

Temuan BPK ✓**Rp 8 M APBD
Sintang Kemana?**

PONTIANAK. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar perihal dana Rp 8 miliar yang digunakan anggota DPRD Sintang periode 2004-2009, sudah tersiar ke publik. Pengguna dana rakyat tersebut harus diminta pertanggungjawabannya.

"BPK harus membongkar secara rinci apa saja temuan itu. Jika ada indikasi pelanggaran pidana, harus melibatkan aparat hukum untuk memprosesnya," desak Daniel Setiawan, Ketua Front Pembela Masyarakat Dayak Uud Danum, Kabupaten Sintang saat bertandang ke Graha Pena Harian Equator, baru-baru ini.

Sebagai elemen masyarakat Sintang, Daniel cukup prihatin dengan temuan itu. Ia meminta temuan tersebut dituntaskan sesegera mungkin, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. "Ini persoalan uang negara. Jangan ada kesan temuan ini mau diarahkan ke masalah administrasi," tegasnya.

Temuan dana APBD Sintang ini diungkapkan pertama kali oleh DR H Rizal Djalil, anggota VI BPK-RI saat menghadiri acara tatap muka dengan Pemda dan anggota DPRD Sintang di kantor BPK Perwakilan Kalbar, Kamis (7/4). "Ada temuan Rp 8 miliar," kata Rizal Djalil.

Rizal mengaku BPK melalui perwakilannya di Kalbar sudah meminta Pemkab Sintang menin

■ Halaman 7

Rp 8 M ✓

.... dari halaman 1

daklanjuti temuan tersebut. Bentuk tindak lanjut yang dimaksud berupa pengembalian ke kas daerah oleh pihak-pihak yang menggunakannya.

Rizal tidak menjelaskan secara rinci bagaimana Rp 8 miliar itu bisa menjadi temuan. Namun jumlah temuan itu merupakan akumulasi dana yang digunakan anggota DPRD Kabupaten Sintang untuk kegiatan kedewanan, seperti perjalanan dinas mulai tahun 2004 hingga tahun 2009.

"Ini berpotensi kerugian Negara. Harus dikembalikan ke kas

Negara," kata Rizal sembari mengatakan masalah temuan itu belum akan ditindaklanjuti BPK dengan melakukan audit khusus, seperti Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Kepala Sub Auditoriat Wilayah I BPK Perwakilan Kalbar, Hernold Ferry Makawimbang mengatakan, temuan itu harus disetor kembali ke kas daerah. "Dana temuan itu ada yang berupa kelebihan pembayaran untuk perjalanan dinas," kata Hernold.

Kelebihan pembayaran itu,

bisa jadi karena dana yang digunakan tidak ada pertanggungjawabannya secara jelas. Contoh kasus bisa berupa kelengkapan bukti perjalanan yang kurang. "Misalnya tidak ada boarding pass," tukas Hernold.

Sejumlah mantan anggota DPRD Sintang periode 2004-2009 yang sekarang terpilih kembali sebagai wakil rakyat memberikan perhatian besar terhadap temuan BPK itu. Mereka mengaku akan segera mengomunikasikan masalah tersebut dengan Pemda Sintang. (bdu)